

Strategi Komunikasi KPU Sleman Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi KPU Pada Pemilu di Kabupaten Sleman Yogyakarta

Raynata Vallerina¹, Herlambang Jati Kusumo²

¹ Universitas Aisyiyah Yogyakarta, vallerinaynata@gmail.com.email

² Universitas Aisyiyah Yogyakarta, herlambangjatikusumo@unisayogya.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Nov, 2025

Revised Des, 2025

Accepted Des, 2025

Kata Kunci:

KPU; Partisipasi Politik; Pemilu; Sleman; Strategi Komunikasi

Keywords:

Communication Strategy; General Election; KPU; Political Participation; Sleman

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik melalui strategi komunikasi yang efektif, transparan, dan adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi KPU Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada pemilu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi dirumuskan, faktor pendukung serta penghambatnya, dan sejauh mana strategi tersebut berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPU Sleman diarahkan pada peningkatan partisipasi pemilih dengan memanfaatkan media sosial (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook) serta forum tatap muka untuk menjangkau audiens dengan karakteristik berbeda. Penyesuaian komunikasi dilakukan terutama untuk pemilih pemula (Generasi Z) melalui pendekatan kreatif seperti pemutaran film dokumenter, konten edukatif, serta kolaborasi dengan komunitas. Tantangan yang dihadapi mencakup keragaman karakter pemilih, keterbatasan literasi digital, serta isu sensitif yang menuntut gaya komunikasi netral dan sesuai regulasi. Kesimpulannya, strategi komunikasi KPU Sleman berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kesadaran politik publik. Namun, optimalisasi masih diperlukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan jangkauan sosialisasi, serta evaluasi berkelanjutan agar strategi komunikasi semakin efektif dan inklusif.

ABSTRACT

General elections are an essential instrument in Indonesia's democratic system that require active public participation. The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), as the institution responsible for organizing elections, plays a strategic role in enhancing political participation through effective, transparent, and adaptive communication strategies. This study aims to analyze the communication strategies implemented by the KPU of Sleman Regency in carrying out its duties and functions during the election process in Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. This research employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The analysis focuses on understanding how communication strategies are formulated, identifying supporting and inhibiting factors, and examining the extent to which these strategies contribute to increased voter participation. The findings indicate that the communication strategies of the Sleman KPU are directed toward improving voter participation by utilizing social media platforms such as Instagram, TikTok, YouTube, and Facebook, as well as face-to-face forums to reach

audiences with diverse characteristics. Communication adjustments are particularly targeted at first-time voters from Generation Z through creative approaches, including documentary film screenings, educational content, and collaborations with community groups. Challenges faced include the diversity of voter characteristics, limitations in digital literacy, and sensitive issues that require neutral communication styles in accordance with existing regulations. In conclusion, the communication strategies implemented by the Sleman KPU contribute to increasing public participation and strengthening political awareness. However, further optimization is needed through enhancing human resource capacity, expanding the reach of socialization efforts, and conducting continuous evaluations to ensure that communication strategies become more effective and inclusive.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Raynata Vallerina

Institution: Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Email: vallerinaraynata@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan. Oleh karena itu, Indonesia menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat (Pratiwi et al., 2024, 2024). Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyatnya. Secara terang terangan disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pemilu Adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Anggota masyarakat perlu mengambil bagian / ikut berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin (baik laki- laki maupun Perempuan) semestinya terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu (Amrullah et al., 2025). Dengan demikian keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui system politik yang terbangun. Pemilihan Pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokrasi ikut di tentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemilihan pejabat publik. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai wujud kedaulatan rakyat, pemilu tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kepemimpinan secara sah, tetapi juga menjadi indikator keberlangsungan demokrasi yang sehat dan partisipatif (SYARIFUDIN, 2015; Triwahyuningsih, 2019). Dalam konteks tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. KPU bertugas memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi pihak manapun (Amelia et al., 2024; Dewi et al., 2022; Halilah, 2022; Rahman et al., 2017).

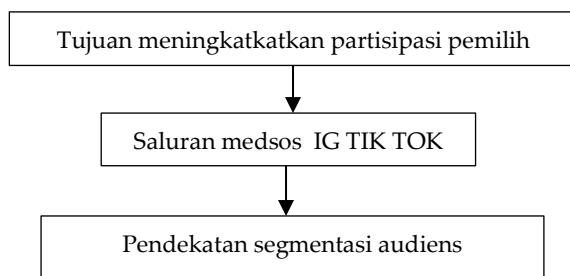
Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator penting keberhasilan pemilu, karena menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran politik dan menggunakan hak pilihnya. KPU di tingkat kabupaten/kota, termasuk KPU Sleman, memiliki peran strategis dalam

meningkatkan partisipasi pemilih melalui strategi komunikasi yang tepat. Efektivitas strategi komunikasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman karakteristik audiens, terutama pemilih pemula, pemilih muda, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Perubahan perilaku pemilih di era digital turut menuntut KPU beradaptasi dalam menyusun strategi komunikasi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook menjadi kanal utama dalam menyampaikan informasi, khususnya bagi generasi muda. Di sisi lain, forum tatap muka tetap dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat pedesaan atau kelompok yang kurang terakses oleh teknologi. Dengan demikian, keberhasilan strategi komunikasi KPU sangat ditentukan oleh kemampuan melakukan segmentasi audiens dan menyesuaikan pendekatan komunikasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi KPU Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada pemilu. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana KPU Sleman merumuskan strategi komunikasi, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta bagaimana strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai praktik komunikasi publik lembaga penyelenggara pemilu di tingkat lokal, sekaligus memperkaya literatur mengenai komunikasi politik dan partisipasi demokratis di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA



Gambar 1. Skema Strategi Komunikasi KPU Melalui Media Sosial

Strategi komunikasi KPU Sleman diarahkan pada peningkatan partisipasi pemilih, penyampaian informasi yang efektif, serta pemanfaatan media sosial sebagai kanal utama.

Komunikasi efektif juga merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat didalam proses komunikasi ini. Kesuksesan Profesional, Karier yang sukses seringkali memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan klien. Dalam lingkungan kerja yang kompetitif, orang yang dapat berkomunikasi dengan efektif cenderung lebih mampu mempengaruhi orang lain, menjalani negosiasi, dan memecahkan masalah dengan baik. Kemampuan berkomunikasi yang baik juga penting dalam membangun jejaring profesional yang kuat. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, hubungan interpersonal yang positif dapat membantu memperluas peluang karier dan bisnis. Kesuksesan Pribadi.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk berkomunikasi dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman sangat penting. Komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk memahami dan merespons kebutuhan emosional dan psikologis orang lain, yang dapat memperkuat hubungan pribadi. Komunikasi interpersonal yang efektif juga membantu kita dalam mengatasi konflik dengan lebih baik. Konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia, tetapi bagaimana kita berkomunikasi selama konflik dapat menentukan hasilnya. Kemampuan untuk berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan empati, dan menyelesaikan masalah bersama-sama dapat menghasilkan solusi yang lebih baik (Zahra, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memahami fenomena strategi komunikasi KPU Kabupaten Sleman dalam konteks penyelenggaraan pemilu secara mendalam dan holistik. Subjek penelitian adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Lokasi penelitian berada di Kantor KPU Kabupaten Sleman, Jalan Merbabu Nomor 19, Sleman, Yogyakarta, dengan durasi penelitian kurang lebih dua bulan (Asrizal Saifi, n.d.; Rismawati et al., 2023; Subiyanto, 2020, 2020).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan KPU; (2) wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan Ketua KPU, Sekretaris, serta anggota KPU Sleman; dan (3) dokumentasi berupa laporan kegiatan tahunan, data partisipasi pemilu, foto, serta arsip pendukung lainnya (Nursanjaya, 2021).

Keabsahan data diuji menggunakan perpanjangan keikutsertaan, keajegan pengamatan, dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Ahyar et al., 2020; Fadli, 2021; Fiantika et al., 2022).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran faktual mengenai konsistensi strategi komunikasi KPU Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPU Sleman berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, penyebaran informasi kepemiluan, dan penguatan kesadaran politik masyarakat. Tujuan utama strategi ini adalah memastikan informasi tersampaikan secara netral, transparan, dan mudah dipahami oleh berbagai segmen pemilih.

Dalam pelaksanaannya, KPU Sleman menggunakan beragam saluran komunikasi, baik digital maupun konvensional. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook dimanfaatkan untuk menjangkau pemilih muda, sementara forum tatap muka di tingkat desa dan komunitas digunakan untuk kelompok masyarakat yang akses digitalnya terbatas. Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan media massa lokal serta tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi.

Strategi komunikasi dirumuskan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh divisi KPU. Prosesnya dimulai dari analisis karakter pemilih, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, penetapan target, serta pengelolaan sumber daya. Penyesuaian komunikasi dilakukan berdasarkan segmentasi audiens: generasi muda dilibatkan melalui konten kreatif seperti film dokumenter, infografis, dan video edukatif, sedangkan masyarakat umum mendapat informasi melalui sosialisasi langsung.

Tantangan utama dalam strategi komunikasi KPU Sleman adalah keberagaman karakter pemilih. Dalam pelaksanaanya KPU Sleman menggunakan berbagai pendekatan komunikasi baik formal maupun non formal. Pendekatan formal dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, serta penyampaian informasi resmi melalui media massa dan website kpu. Sementara itu, pendekatan non formal dilakukan melalui kegiatan tatap muka, dialog publik, dan kerja sama dengan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan informasi. rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU menerapkan komunikasi yang lebih cair, menjaga netralitas, serta melakukan evaluasi berkelanjutan setelah setiap kegiatan sosialisasi.

Indikator keberhasilan strategi komunikasi ditunjukkan melalui meningkatnya tingkat partisipasi pemilih, bertambahnya kesadaran politik masyarakat, berkurangnya suara tidak sah,

serta meluasnya distribusi informasi melalui kerja sama dengan komunitas, relawan demokrasi, dan tokoh masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi KPU Sleman telah berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal. Namun, optimalisasi lebih lanjut masih diperlukan, terutama pada penguatan interaksi dua arah, peningkatan kapasitas SDM, dan inovasi konten digital yang inklusif.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi KPU Sleman telah berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan membangun kesadaran politik masyarakat. Strategi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan media sosial (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook), website resmi, media massa lokal, serta forum tatap muka untuk menjangkau audiens dengan karakteristik berbeda.

Pendekatan komunikasi disesuaikan dengan segmen pemilih, terutama generasi muda, melalui konten kreatif, edukatif, dan interaktif. Prinsip netralitas, transparansi, serta interaksi dua arah menjadi dasar dalam setiap strategi komunikasi yang dijalankan. Hasilnya, terjadi peningkatan partisipasi politik, perluasan distribusi informasi, serta penguatan citra KPU sebagai lembaga yang akuntabel.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya literasi digital di beberapa kelompok masyarakat, serta kurang optimalnya interaksi dialogis dengan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi media digital, perluasan jangkauan sosialisasi, serta evaluasi berkelanjutan agar strategi komunikasi KPU semakin efektif dan inklusif dalam mendukung proses demokrasi di tingkat lokal.

Bagian ini harus dapat mendeskripsikan inti sari dari keseluruhan hasil penelitian yang dapat menjawab tujuan penelitian dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu baik secara praktis maupun secara akademis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Herlambang dan Bapak Hari Akbar Sugiantoro atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman atas kerja sama dan dukungan data yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., Gc, B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Amelia, A., Kamal, M., & Khalid, H. (2024). Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 479–494.
- Amrullah, F., Dwivayani, K. D., Nurliyah, N., & Sucipta, J. A. W. (2025). Literasi politik Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Samarinda. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12(1), 379–390.
- Asrizal Saiin, M. H. (n.d.). Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2, 132–140.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.

- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi*.
- Halilah, S. (2022). Analisis peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II).
- Nursanjaya, N. (2021). Memahami prosedur penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk memudahkan mahasiswa. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 126–141.
- Pratiwi, N. I., Rahayu, N. P. D., & Satria, W. I. (2024). Sosialisasi Penggunaan Komunikasi Efektif untuk Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1717–1723.
- Rahman, A. A., Amin, M. J., & Utomo, H. S. (2017). Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5, 1232–1242.
- Rismawati, R., Ulandari, P., Utari, E., Argadinata, B., & Anwar, M. S. (2023). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2 SE-Articles), 11686–11697. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1782>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371.
- Syarifudin, S. (2015). Komunikasi Politik Bermedia Dan Penggunaannya Oleh Masyarakat (Survey Pada Masyarakat Palopo Sulawesi Selatan Tentang Kampanye Pilpres 2014). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19(1), 47–62.
- Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 62–69.